

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, S., & Harsono, I. (2025). Analisis potensi dan efektivitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. *Ganec Swara*, 19(1), 1–12.
- Ardani, R., & Nugroho, A. (2023). Desentralisasi fiskal dan kualitas belanja publik di Indonesia. *Jurnal Keuangan Publik*, 11(2), 85–99.
- Bird, R., & Bahl, R. (2008). Subnational Taxes in Developing Countries: The Way Forward. *Public Budgeting & Finance*, 28 <https://doi.org/10.2139/ssrn.1273753>.
- Bird, R. M. (2010). Subnational taxation in developing countries: A review of the literature. *Policy Research Working Paper*.
- Bird, R. M., & Martinez-Vazquez, J. (2014). Taxation and decentralization: A reconsideration. *World Development*, 62, 119–134.
- Bukit Jaya, A. I. (2024). Implikasi Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah terhadap pengaturan pajak dan pendapatan asli daerah. *Jurnal Yuridis*, 11(2), 145–162.
- Dinata, M. S., Prasetyo, A., & Lestari, D. (2025). Analisis efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota. *Majalah Ilmiah Cahaya Ilmu*, 6(1), 45–59.
- Fadhila, I., & Pratiwi, V. F. (2023). Analisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 8(1), 55–67.
- Fiskal, B. K. (2023). *Kajian kebijakan fiskal daerah pasca reformasi perpajakan*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Halim, A., & Abdullah, S. (2010). *Akuntansi keuangan daerah*. Salemba Empat.
- Halim, A., & Abdullah, S. (2020). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Keuangan, D. J. P. (2023). *Kebijakan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Khoryani, P., Putri, N. P., & Suryani, L. (2025). Kontribusi komponen pendapatan asli daerah terhadap realisasi PAD. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 16(1), 33–47.
- Mahmudi. (2011). *Manajemen keuangan daerah*. UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen kinerja sektor publik*. UPP STIM YKPN.

- Mardiasmo. (2021). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah* (3 (ed.)). Andi Offset.
- Noviyanti, I., Rahmawati, S., & Putra, D. A. (2025). Analisis efektivitas pajak daerah berbasis aset dan transaksi terhadap pendapatan asli daerah. *Jurnal Audit Dan Perpajakan*, 5(2), 120–134.
- Oates, W. E. (1972). *Fiscal federalism*. Harcourt Brace Jovanovich.
- Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1985). A conceptual model of service quality and its implications for future research. *Journal of Marketing*, 49(4), 41–50.
- Pramanda, R., & Firmansyah, D. (2023). Ketergantungan fiskal daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 21(3), 201–215.
- Pratama, A., & Yuliani. (2021). Modernisasi Administrasi Perpajakan Daerah dan Dampaknya terhadap Kinerja Penerimaan. *Jurnal Akuntansi Publik*, 8(1), 33–48.
- Putra, A. R., Lestari, M., & Mahardika, P. (2024). Reformasi pajak daerah dalam Undang-Undang HKPD dan implikasinya terhadap kapasitas fiskal daerah. *Jurnal Kebijakan Fiskal*, 8(1), 55–70.
- Putri, A. D., & Nugroho, R. S. (2020). Analisis tingkat kepatuhan pajak reklame dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 15(2), 120–135.
- Rahman, A., & Yuliani. (2021). Analisis Kinerja Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dalam Kerangka Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Publik*, 6(2), 85–99.
- Rahmawati, D., Siregar, H., & Syamsuddin. (2021). Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 12(3), 245–260.
- Rosdiana, H., & Irianto, E. S. (2012). *Pengantar ilmu pajak: Kebijakan dan implementasi di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Salsabillah, V., & Galuh, A. K. (2025). An analysis of the effectiveness and contribution of local taxes and local user fees on local own-source revenue improvement in East Java. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 4(2), 45–60.
- Sari, D. P., Andriani, E., & Hanum, Z. (2022). Efektivitas pemungutan pajak daerah dan implikasinya terhadap pendapatan asli daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi Sektor Publik*, 8(1), 45–58.

- Sari, R. P., Susanti, N., & Kresnawati. (2025). An analysis of budget realization report of regional revenue agency. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(2), 95–102.
- Shah, A., & Boadway, R. (2021). *Fiscal Federalism: Principles and Practice of Multiorder Governance*. Cambridge University Press.
- Sularso, H., & Restianto, Y. E. (2011). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 6(1), 1–17.
- Tyas, N. W., Prakoso, A., & Hidayat, R. (2025). Analisis kontribusi dan efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 4(1), 15–29.
- Wahyuni, S., & Prasetyo, B. (2023). Evaluasi Kebijakan Retribusi Daerah Pasca Reformasi Regulasi Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 8(1), 45–60.
- Wibowo, A., & Santoso, B. (2023). Tantangan Implementasi Kebijakan Fiskal Daerah Pasca UU HKPD. *Jurnal Kebijakan Publik*, 18(1), 67–82.
- Widodo, T., & Wulandari, R. (2018). Analisis potensi dan realisasi pajak daerah serta implikasinya terhadap pendapatan asli daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 9(2), 101–115.
- Yulianingsih, H., & Rakhmawati, I. (2025). Pengaruh perubahan fiskal UU HKPD terhadap kemandirian fiskal daerah. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsur*, 10(1), 25–39.
- Yuvanda, S., Rachmad, M., & Jakfar, M. (2024). Dampak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah terhadap penerimaan pajak dan retribusi daerah. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan (Mankeu)*, 13(1), 88–103.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia, Kabupaten Bengkalis. (2023). Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bengkalis: Pemerintah Kabupaten Bengkalis.